



ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Farih Rizqi Putranto¹, Tri Yuniningsih², Ida Hayu Dwimawanti³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kota Pos.1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Policies are always attached to every state life. A good policy is one that is able to solve problems carefully, including in waste management policies. The more the human population, the greater the amount of waste produced and if it cannot be managed properly, the problems will be more complex. The waste management policy in Banyumas Regency has yet to find a concrete solution to the waste problem both from the generation and follow-up problems. This research is an analysis of waste management policies in Banyumas Regency with the aim of analyzing and recommending policy alternatives. This research uses a qualitative descriptive method with snowball sampling technique in determining informants with the key informant being the Head of the Banyumas Regency Environmental Service. The theory used is the theory of policy analysis from Bardach (in Tumanggor, 2018), namely finding problem formulations, determining goals and objectives, identifying policy parameters, seeking policy alternatives, assessing policy alternatives, and recommending policies. The selected policy parameters in determining the assessment of alternative policies use Patton Sawicky's criteria (in Yuniningsih, 2015), namely technical feasibility, economic and financial capability, political feasibility, and administrative capability. Adequate TPST, lack of community commitment, and failure of waste management policies to meet targets. This study recommends that the Government of Banyumas Regency conduct outreach to the community regarding source-based waste management and recommends that the policy needed is the development of hangars and TPST at the sub-district level as a source-based waste management method.

Keyword : Policy Analysis , Waste Management, Policy Recommendation

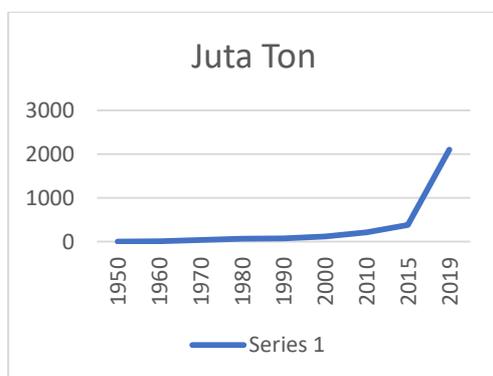
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia dan tumbuhnya populasi manusia itu sendiri membawa dampak pada peningkatan sampah karena manusia menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sampah yang tidak dapat dikelola dengan bijak, dalam jumlah yang besar akan mengganggu kesehatan lingkungan. Komunitas negara-negara di dunia yang terhimpun dalam perserikatan bangsa-bangsa, telah menyepakati secara bersama-sama mengenai visi pembangunan dunia yang terangkum dalam 17 arah prioritas pembangunan dunia dalam *sustainable development goals* (SDGs). Tujuh belas indikator pembangunan dunia salah satunya mengisyaratkan mengenai akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Akses sanitasi di dalamnya eksplisit menerangkan perihal pengelolaan sampah.

Gambar 1.1

Produksi Sampah Dunia



Sumber : Kompas (2018) , (Verisk Maplecroft 2019)

Gambar 1.1 menunjukkan produksi sampah di dunia sejak 1950 hingga 2019. Berdasarkan data dari *ScienceMag* sebagaimana dikutip oleh Kompas (2018) produksi sampah dunia terhitung sejak 1950 sampai dengan 2015 cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1950, jumlah produksi sampah masih pada kisaran 2 juta ton, sementara 65 tahun setelah itu, pada tahun 2015 produksi sampah dunia mencapai 381 juta ton pertahun atau meningkat 190 kali lipat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton pertahunnya

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar juga mengalami peningkatan produksi sampah. Indonesia berada di peringkat kedua dunia pembuang sampah plastik ke laut dengan laju 0,52 kg sampah/orang/hari atau setara 3,22 MMT/tahun (Septiani et al., 2019). Prestasi yang buruk tersebut menambah catatan *minor* pengelolaan sampah di Indonesia. Dewasa ini, sampah menjadi salah satu permasalahan yang kritis dan memerlukan penanganan yang serius dan segera. Sampah plastik menjadi yang paling mengherankan. Studi dengan judul *plastic waste associated with disease on coral reefs* menunjukkan bahwa, sampah plastik paling banyak ditemukan di

Indonesia, yakni 25,6 bagian per 100m² terumbu karang di lautan (Lamb et al., 2018). Pada tahun 2019, Indonesia ditaksir menghasilkan hingga 66-67 juta ton sampah atau setara dengan 175.000 ton sampah atau dengan kata lain dapat disamakan satu orang menghasilkan sampah sebesar 0,7 kg per hari (KLHK 2019).

Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga tidak heran jika jumlah produksi sampah juga banyak. Banyaknya timbulan sampah juga diakibatkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang masih sangat tinggi khususnya terhadap penggunaan kemasan plastik. Penelitian Purwoko (2012) (dalam Septiani et al., 2019) merekomendasikan agar Pemerintah mengenakan cukai bertarif tinggi pada kantong plastik guna menurunkan permintaan kantong plastik tanpa mengurangi produk domestik bruto. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pola konsumsi khususnya penggunaan plastik masih sangat tinggi dilakukan oleh masyarakat kita.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan tingkat volume sampah terbesar ke 11 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan jumlah produksi volume sampah perhari mencapai 192 793

m³. Rata rata volume sampah yang terangkut perhari sebesar 22,72 % atau masih di bawah rata-rata keterangkutan sampah perhari Provinsi Jawa tengah yang mencapai 26,94%. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 1.679.124 jiwa dan merupakan 4 besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak (jateng.bps.go.id 11/09/19).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Banyumas adalah volume sampah yang berserakan di penampungan pemukiman menyebabkan bau, pengangkutan sampah yang mengganggu transportasi, tempat penampungan sampah yang tidak sesuai dengan volume sampah, sampah yang dipisahkan warga tidak bermanfaat, kebiasaan warga membuang sampah di sungai, tidak memiliki informasi tentang teknologi sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat belum optimal, belum maksimalnya dukungan masyarakat dan pemerintah, dan kelompok masyarakat yang belum mengetahui pemanfaatan sampah (Widiyanto et al., 2017).

Masyarakat di Kabupaten Banyumas kebanyakan tidak memiliki lahan untuk pengelolaan sampah sekaligus kurang sadar terhadap pembuangan sampah (Rahajuni, 2018). Permasalahan

sampah di Kabupaten Banyumas yang mencapai 35% tidak bisa dikelola, salah satunya diakibatkan oleh jumlah TPA yang tidak memadai, serta pengelolaan sampah terpadu yang belum berjalan optimal (Widiyanto et al., 2017). (Andarwati et al., 2018) menemukan jika partisipasi ASN dan dinas di Kabupaten Banyumas untuk mengumpulkan sampah melalui bank sampah hanya mencapai 21,4%, Penelitian lain menemukan bahwa TPA Gunung Tugel sebagai salah satu pembuangan sampah sudah melebihi kapasitas dan umur TPA yang semakin berkurang (Suyanto et al., 2015). Siti Deli, dkk. (2019) menemukan permasalahan pengelolaan sampah belum menemukan pola yang efektif. Penelitian tersebut juga menemukan adanya pengaruh peran kepemimpinan di dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimana analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Proses Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas
2. Untuk Memberikan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Pfiffner dan Prestus (dalam Syafiie, 2010:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

(1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan pemerintah.

(2) Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988:29-30) adalah proses sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan

seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dalam definisi yang mashur dari Dye, yaitu *whatever government choose to do or not to do*. Maknanya, Dye hendak menyatakan bahwa kebijakan publik apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan (dalam Indiahono, 2017). James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu James Anderson (dalam Indiahono, 2017).

3. Analisis Kebijakan

Wiliam Dunn (1994) (dalam Nugroho, 2017) menyatakan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.

Menurut Bardach (dalam Tumanggor, 2018) menyebutkan bahwa proses analisis kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Formulasi Masalah Kebijakan

Formulasi masalah kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial karena jika dalam memfokuskan masalahnya tersebut salah atau tidak benar maka kebijakan publik yang akan diterapkan juga tidak benar. Mengkaji suatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tahapan perumusan tujuan dan sasaran menjadi penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

c. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan merupakan hal penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Parameter - parameter kebijakan ini perlu dinilai lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan seperti : 1) Apakah alternatif kebijakan yang disampaikan menyediakan pandangan ke depan (*forward looking*) yang lengkap dan

memungkinkan ? 2). Apakah alternatif kebijakan yang ditawarkan bisa mengantisipasi berbagai hal yang mungkin di kemudian hari ? 3). Apakah alternatif kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi - implikasi (politis, ekonomis, lingkungan dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif? 4). Apakah alternatif kebijakan menyediakan strategi yang jelas dan realistis terhadap sebuah proposal kebijakan ? 5). Apakah alternatif kebijakan tersebut mudah dilaksanakan ?

d. Mencari Alternatif-Alternatif

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang mendalam. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

e. Memutuskan Alternatif -Alternatif Pilihan

Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih

baik jika lebih dari satu pilihan, agar pihak pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan.

Proses analisis kebijakan memuat kriteria atau parameter kebijakan. Patton dan Sawicky (dalam Tumanggor, 2018) mengajukan empat kriteria atau parameter dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu :

1. Kelayakan Teknis (*Technical feasibility*)

Apakah alternatif yang dipilih dapat mengatasi pokok persoalan yang muncul. Ini mencakup dua sub – kriteria, yakni efektivitas (*effectiveness*) dan kecukupan (*adequacy*). Efektivitas menyangkut, apakah alternatif yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan kecukupan menyangkut seberapa jauh alternatif yang dipilih mampu memecahkan persoalan.

2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*)

Kriteria ini menyangkut : sub-kriteria *economic efficiency, profitability dan cost effectiveness*. Efisiensi ekonomi mempersoalkan apakah dengan menggunakan sumber yang ada dapat diperoleh manfaat yang optimal. Profitability mempersoalkan

perbandingan antara input dan output kebijakan, sedangkan efisiensi biaya mempersoalkan apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimal.

3. Kelayakan Politik (*Political Viability*)

Kriteria ini mencakup subkriteria : tingkat penerimaan, kepatutan, daya tanggap, legal dan keadilan. Tingkat penerimaan adalah apakah alternatif kebijakan yang bersangkutan dapat diterima oleh para aktor politik dan masyarakat. Kepatutan mempersoalkan apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Daya tanggap menanyakan apakah kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Legal adalah apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Aspek keadilan menanyakan apakah kebijakan tersebut dapat mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Kelayakan Administratif (*Administrative Operability*)

Kriteria ini mencakup otoritas, komitmen institusi, kapasitas dan dukungan organisasi. Otoritas mempersoalkan apakah organisasi pelaksana kebijakan cukup memiliki otoritas. Komitmen institusi menyangkut komitmen dari para

administrator dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kapasitas berkenaan dengan kemampuan aparatur baik kemampuan konseptual maupun keterampilan. Dukungan organisasi adalah ada tidaknya dukungan dari organisasi pelaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui lebih dalam mengenai analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Locus penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan penentuan responden menggunakan Teknik *snowball sampling* dengan *key informan* Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Subyek penelitian antara lain yaitu

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2. UPKP Persampahan Wilayah Ajibarang
3. TPST Kedungrandu Kabupaten Banyumas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

a. Formulasi Masalah

Penelitian ini menemukan permasalahan pertama yang menjadi persoalan dalam pengelolaan

sampah adalah tidak adanya TPA (tempat pembuangan akhir) yang layak. Hal ini dikarenakan kondisi TPA yang ada saat ini tepatnya di TPA Gunung Tugel sudah tidak mampu menampung timbulan sampah dan juga sudah kelebihan kapasitas. Timbulan sampah yang ada tidak dapat dikelola dengan baik di TPA ini. Selain itu permasalahan yang ditimbulkan selanjutnya adalah perubahan kebijakan pengelolaan sampah dari system *open dumping* menjadi pengelolaan sampah berbasis dari sumbernya belum dilaksanakan secara maksimal. Pengelolaan dengan sistem *open dumping* yaitu pengelolaan sampah dengan pola *tamping – angkut- buang* ke TPA sedangkan pengelolaan dari sumbernya berarti bahwa pengelolaan sampah tidak menimbulkan timbulan sampah tetapi habis dikelola dari sumbernya. Penelitian di lapangan menemukan kondisi timbulan sampah masih 70-80 % dan pengelolaan pada sumbernya belum maksimal. Komitmen bersama antara pemangku kebijakan juga belum optimal, hal ini ditandai dengan adanya pemanfaatan TPST (tempat

pengelolaan sampah terpadu) sebagai cikal bakal pengelolaan dari sumbernya belum optimal. Salah satu TPST yang sudah berjalan baik adalah di TPST Kedungrandu yang merupakan TPST dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Tetapi TPST lain belum optimal pelaksanaannya dan jumlahnya masih terbatas. Masyarakat juga masih memandang Kebijakan pengelolaan sampah merupakan urusan Pemerintah bukan menjadi tanggung jawab bersama individu/rumah tangga.

b. Merumuskan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas adalah mengoptimalkan perubahan kebijakan dari system *open dumping* menjadi sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada sumbernya. Sasaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan hasil penelitian di Dinas Lingkungan Hidup adalah Kabupaten Banyumas *zero waste*.

c. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Parameter kebijakan didasarkan pada penilaian penulis terhadap setiap kriteria yang dipandang perlu mendapat perhatian yaitu pada kelayakan teknis dan kemampuan ekonomi dan finansial. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan memperoleh efektivitas dan efisiensi di dalam memberi pertimbangan rekomendasi kebijakan. Selain efektivitas dan efisiensi di dalam kriteria kemampuan ekonomi dan finansial perlu dipertimbangkan dari sisi sumber daya (*resources*) atau input terhadap hasil atau output yang di dapatkan. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dengan asumsi semakin besar hasil yang diperoleh merupakan salah satu pertimbangan. Penilaian tersebut juga tidak bisa dihilangkan dari penilaian tentang jangka pendek dan jangka Panjang. Penilaian kelayakan politik melihat peran interaksi antar Lembaga pelaksana Kebijakan Pengelolaan Sampah dan juga reaksi positif dari masyarakat terhadap rekomendasi kebijakan yang dipilih. Kelayakan administratif melihat sisi kelenturan alternatif kebijakan

yang dipilih secara layak dapat dilaksanakan atau tidak

d. Mencari Alternatif-Alternatif

Penelitian ini menemukan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Alternatif kebijakan tersebut antara lain yaitu:

1. Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos dan Sampah Anorganik Sebagai Bahan Daur Ulang
2. Memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Kecamatan
3. Membangun Komitmen Masyarakat Desa Melalui Pembentukan KSM
4. Mengaktifkan Peran Bank Sampah

e. Menilai Alternatif Kebijakan

Produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu pilihan, agar pihak pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan. Dalam

hemat penulis, memilih alternatif kebijakan dalam penelitian ini berarti menentukan alternatif kebijakan dengan nilai tertinggi sebagai rekomendasi kebijakan.

Tabel 1
Penilaian Bobot dalam Alternatif Kebijakan

No	Kriteria	Bobot
1	Kelayakan Teknis	0,30
2	Kemampuan Ekonomi dan Finansial	0,25
3	Kelayakan Politik	0,20
4	Kelayakan Administratif	0,25

Tabel 2
Skor Alternatif Kebijakan

No	Alternatif	Kriteria	Bobot	Nilai	Skor
1	Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos dan Sampah Anorganik Sebagai Bahan Daur Ulang	Kelayakan Teknis	0,30	3	0,9
		Kemampuan Ekonomi dan Finansial	0,25	4	1
		Kelayakan Politik	0,20	2	0,4
		Kelayakan Administratif	0,25	3	0,75
TOTAL SKOR					3,05
2	Memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Kecamatan	Kelayakan Teknis	0,30	4	1,2
		Kemampuan Ekonomi dan Finansial	0,25	2	0,5
		Kelayakan Politik	0,20	3	0,6
		Kelayakan Administratif	0,25	4	1
TOTAL SKOR					3,3
3	Membangun Komitmen Masyarakat Desa Melalui Pembentukan KSM	Kelayakan Teknis	0,30	2	0,6
		Kemampuan Ekonomi dan Finansial	0,25	3	0,75
		Kelayakan Politik	0,20	2	0,4
		Kelayakan Administratif	0,25	4	1
TOTAL SKOR					2,75
4	Mengaktifkan Peran Bank Sampah	Kelayakan Teknis	0,30	3	0,9
		Kemampuan Ekonomi dan Finansial	0,25	3	0,75
		Kelayakan Politik	0,20	2	0,4
		Kelayakan Administratif	0,25	3	0,75
TOTAL SKOR					2,8

2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

a. Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos dan Sampah Anorganik Sebagai Bahan Daur Ulang

Alternatif kebijakan tersebut secara teknis dengan penilaian efektivitas dan efisien mendapat penilaian yang baik karena pengelolaan sampah menjadi dapat dilaksanakan dari sumbernya. Penilaian tersebut menjadikan masyarakat sebagai obyek di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Timbulan sampah menjadi berkurang bahkan tidak terjadi timbulan pada TPA yang ada. Kemampuan ekonomi lebih mudah dan murah tetapi perlu dipertimbangkan akan keberlanjutannya, dibutuhkan pemecahan masalah terhadap hasil dari Kompos dan bahan daur ulang, apakah menjadi tanggung jawab masyarakat atau menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kelayakan politik akan mendapat gejolak di masyarakat manakala masyarakat tidak berhasil memanfaatkan hasil sampah baik yang berbahan dasar organik maupun non organik. Masyarakat yang gagal mengelola sampah justru akan menimbulkan penyakit di masyarakat terlebih kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap pengelolaan sampah

masih rendah. Alternatif tersebut nantinya juga akan menuntut terbentuknya KSM yang terorganisir dalam satu Kabupaten. Alternatif ini memiliki peluang tidak berhasil jika pemangku kebijakan tidak mempunyai perhitungan yang matang di dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan. Penilaian kelayakan administratif melihat alternatif ini dapat dilaksanakan karena secara praktik nantinya dibutuhkan adalah penguatan Lembaga masyarakat yaitu KSM.

b. Memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Kecamatan

Alternatif kebijakan ini melihat permasalahan sampah adalah pada tidak adanya TPA yang memadai dan sudah tidak mampu menanggung permasalahan. Penilaian dalam hal ini dari sisi kelayakan teknis, secara detail dalam hal efisiensi dan efektivitas. Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 Kabupaten Banyumas menjadi *zero waste* melalui pengelolaan sampah berbasis sumbernya sehingga pembuatan hanggar sampah dan TPST di tingkat Kecamatan akan mudah mencapai target tersebut meskipun dibutuhkan anggaran atau sumber dana yang cukup besar di dalam pembangunannya namun demikian Pemda tidak membutuhkan lagi area TPA yang sudah minim dan sulit mencari lahan yang

besar. Kelayakan ekonomi dan finansial memang membutuhkan usaha yang cukup besar terutama dalam menganggarkan infrastruktur dalam pembuatan TPST tetapi Pemda dapat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari APBD, Dana Bagi Hasil, Transfer Daerah, maupun memanfaatkan PAD. Selain hal tersebut dapat juga dilakukan skema kerjama sama baik *public private partnership*, NGO, dan lain sebagainya. Kelayakan politik memperoleh penilaian paling bagus hal ini dikarenakan persepsi di masyarakat menjadi dapat ditemukan titik keseimbangannya. Masyarakat tetap memiliki peran dalam pengelolaan sampah tetapi juga Pemerintah telah menemukan peranya untuk membangun pengelolaan sampah di wilayah-wilayah. Pengembangan komunikasi antar Lembaga yang berkepentingan menjadi jelas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai tingkatan atas dan UPKP menjadi pelaksana lanjutan. Pengelolaan hanggar/TPST menjadi wewenang dibawah UPKP yang bertanggung jawab. Komunikasi ini akan menjawab persoalan yang selama ini menjadi runcing antara keiinginan DLH mengelola pada sumbernya namun UPKP tidak memiliki kekuatan dan sumber daya untuk melaksanakanya sehingga timbulan sampah tetap menjadi persoalan. Kelayakan administratif menjadi mungkin

dilaksanakan karena alternatif kebijakan ini telah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas, SSK (Sistem Sanitasi Kabupaten), maupun yang terkandung di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023.

c. Membangun Komitmen Masyarakat Desa Melalui Pembentukan KSM

Alternatif ini menekankan peran penting Desa sebagai subjek pengelolaan sampah. Alternatif kebijakan ini secara teknis akan terhambat dan sulit mencapai tujuan manakala komitmen Pemerintah Desa tidak berjalan maksimal. Lebih dari itu, tidak semua Pemerintah Desa menguasai dan mampu mengambil peran secara langsung terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah Desa dapat membuat dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat namun demikian KSM ini bukan lah hal yang mudah untuk dilaksanakan terlebih pada kondisi masyarakat Desa yang masih belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Penggunaan dana dan sumber daya menjadi sulit berhasil tatkala KSM tidak memiliki peran yang jelas apalagi setelah sampah dikelola mereka tidak mempunyai ruang untuk mengembangkan usaha-usaha hasil pengelolaan sampah. Kelayakan politik akan menjadi rumit karena hubungan antara KSM dan pemerintah Desa harus

sinergi, kemudian hubungan antara KSM dengan UPKP yang juga harus mengambil peran di dalamnya. Kelayakan administratif Pemda harus membuat payung hukum mengenai pembentukan KSM dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat desa agar memiliki komitmen yang luas dan kuat akan pentingnya pengelolaan sampah.

d. Mengaktifkan Peran Bank Sampah

Alternatif kebijakan ini melihat sisi masyarakat atau individu sebagai penghasil sampah sekaligus juga harus menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap hasil sampahnya. Alternatif ini menilai secara teknis baik dari sisi efisiensi dan efektivitas tujuan pengelolaan sampah belum mampu untuk dilaksanakan. Mengaktifkan peran bank sampah terlebih dilakukan pada tingkatan RT atau Dasawisma dapat dilaksanakan tetapi tidak bisa menjadi ukuran untuk pengelolaan sampah di tingkat Daerah. Bank Sampah berarti keaktifan masyarakat Kembali dituntut untuk mengumpulkan sampah di rumahnya dan kemudian mengelolanya. Secara ekonomi menjadi sangat murah karena tidak membutuhkan biaya yang bersumber dari APBD cukup besar melainkan harus juga diimbangi dengan kemampuan masyarakat di Desa. Kelayakan politik tidak melihat alternatif ini sukses manakala terjadi tumpang tindih

kewenangan, siapa yang akan dapat mengontrol secara teknis di lapangan akan alternatif ini dan siapa yang berhak menjadi penanggung jawabnya. Apabila dilihat agar UPKP berperan di dalamnya tampaknya tidak berhasil sempurna jika diperbandingkan antara pegawai UPKP dengan banyaknya Desa yang menjadi pangkuanya. Penilaian secara administratif pun menjadi sulit terlebih harus mempunyai pedoman SOP Pelaksanaan di lapangan apakah Bank Sampah mempunyai kewajiban menyetorkan hasil, bagaimana teknis pelaksanaannya, dan siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Bank Sampah sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi tidak sebagai sebuah tujuan utama karena peran Bank Sampah merupakan kebijakan yang bisa dilaksanakan di tingkat mikro tetapi akan sulit terlaksana pada level makro dalam hal ini lingkungan Kabupaten Banyumas. Karakteristik masyarakat setiap desa berbeda itulah yang menjadi salah satu pertimbangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa alternatif kebijakan nomor 2, yaitu alternatif kebijakan dengan Memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Desa dan Kecamatan, merupakan alternatif kebijakan dengan perolehan penilaian paling dominan diantara kebijakan lainnya dengan nilai 3,3 dari 4.

Apabila di kalkulasi ke dalam bentuk nilai 100 maka alternatif kebijakan ini mendapat nilai 82,5. Alternatif kebijakan dengan memperbanyak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan hanggar dinilai akan mampu menampung volume sampah yang sangat besar jumlahnya. Alternatif kebijakan ini juga dinilai paling rasional, mengingat jumlah sampah di Kabupaten Banyumas yang sudah terlanjur menggunung dan harus segera ditangani sebelum menjadi bencana sampah yang akan merusak lingkungan sekitarnya.

PENUTUP

1. Simpulan

Proses analisis kebijakan pengelolaan sampah dalam formulasi masalah yang ditemukan antara lain, tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, kebijakan pengelolaan sampah pada sumbernya belum mampu menurunkan timbulan sampah secara signifikan, kurangnya komitmen bersama masyarakat, dan jumlah hanggar TPST yang terbatas belum mampu menurunkan jumlah timbulan sampah. Adapun dalam perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa Kabupaten Banyumas menjadi daerah *zero waste* pada tahun 2023 dan pengelolaan sampah yang berbasis pada sumbernya.

Alternatif-alternatif yang ditawarkan di dalam penelitian ini adalah Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos dan Sampah Anorganik Sebagai Bahan Daur Ulang, memperbanyak hanggar dan TPST di tingkat Kecamatan, membangun komitmen masyarakat Desa melalui pembentukan KSM, dan mengaktifkan peran Bank sampah

Rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas adalah alternatif kebijakan untuk memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Kecamatan. yang memperoleh skor tertinggi diantara alternatif lainya dengan nilai 3,3 dari 4.

2. Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat menggalakan dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis pada sumbernya kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat melaksanakan pengembangan hanggar dan TPST di tingkat Kecamatan untuk dapat menampung volume timbulan sampah serta mensukseskan Banyumas *zero waste* di tahun 2023.
- c. Jangka pendek yang dapat dilaksanakan di dalam pelaksanaan

kebijakan adalah dengan melakukan sinergi antar pemangku kepentingan sehingga jangka Panjang yang dapat diperoleh adalah Kabupaten Banyumas memiliki sistem pengelolaan sampah dari sumbernya dalam mewujudkan Banyumas *zero waste*.

DAFTAR PUSTAKA

- agustino, leo. (2008). *Dasar dasar kebijakan publik*.
- Andarwati, I. et.,al. (2018). Studi Pengelolaan Bank Sampah pada Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017. *Buletin Keslingmas*.
<https://doi.org/10.31983/keslingmas.v37i4.3794>
- Haryadi. (2018). *Pemberdayaan Tim Penggerak PKK melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*.
- Hertati, D. (2017). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Solusi Alternatif *Green City* di Kota Surabaya. *Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 7.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
<https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2016.05.001>
- Lamb, J. B., et.,al. (2018). Plastic waste associated with disease on coral reefs. *Science*.
<https://doi.org/10.1126/science.aar3320>
- Nugroho, A. S., et.,al. (2018). Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Solusi Energi Aklternatif. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*.
<https://doi.org/10.24176/simet.v9i1.1772>
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
<https://doi.org/10.1017/S0033291702006190>
- Paulus I fon Jantua Tumanggor, R. S. S. (2018). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Septiani, B. A., et., al. (2019). PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI SALATIGA: Praktik, dan tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
<https://doi.org/10.14710/jil.17.1.90-99>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, E.,et.,al. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v3i1.1295>
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi*

Publik. Jakarta : Rineka Cipta.

- Utomo, O. T., & Hilal, N. (2017).
*Tinjauan Pengelolaan Sampah di
Objek Wisata Dream Land Water
Park Ajibarang Kabupaten
Banyumas Tahun 2016*.
- Wahyudi, A. (2016). Analisis Kebijakan
Pengelolaan Sampah di Kota
Samarinda : Problematisasi
Kebijakan dengan Pendekatn WPR.
Borneo Administrator, 12.
- Widiyanto, A. et., al. (2017). Model
pengelolaan sampah rumah tangga di
kabupaten banyumas.
*"Pengembangan Sumber Daya
Perdesaan Dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan VII" 17-18 November
2017 Purwokerto*.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik :
Teori dan Proses*. Media Presindo.
- Yuniningsih, T. (2015). ANALISIS
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
OBYEK WISATA TAMAN
WISATA MARGASATWA
MANGKANG SEMARANG.
GEMA PUBLICA.
[https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.
104-116](https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.104-116)
- Zusfahair, Z.,et.,al. (2007).
BIODEGRADASI POLIETILENA
MENGUNAKAN BAKTERI
DARI TPA (TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR)
GUNUNG TUGEL KABUPATEN
BANYUMAS. *Molekul*.
[https://doi.org/10.20884/1.jm.2007.2
.2.39](https://doi.org/10.20884/1.jm.2007.2.2.39)